



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TA. 2025



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin.

Pangkajene Sidenreng,

2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 198106112000031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	 5
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	5
2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 22
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2025	22
 BAB IV PENUTUP	 38

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah dokumen yang berisi tentang perubahan rencana kerja di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025. Perubahan rencana kerja dapat dilakukan pada program, kegiatan, sub kegiatan, nilai anggaran, jenis rekening belanja maupun target kinerjanya.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Perubahan yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mengsinergi, mensinkronkan dan mengintegrasikan program Pembangunan nasional dengan pembangunan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program/kegiatan yang tetap searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada terlaksananya Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten serta Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabuapten Sidenreng Rappang. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan daerah terakumulasi dan berpedoman pada tema RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu

“Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. dengan salah satu Prioritas Pembangunan yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup yakni Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan.

I. 2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);

I. 3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

- a. Merupakan bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar
- b. Penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

Tujuan :

- a. Tersedianya dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- b. Tercapainya konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024 – 2026.
- c. Tersedianya Rencana Kerja Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan dan Rujukan dalam menetapkan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 - 2026.

I. 4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Renja OPD, landasan hukum;
- Bab II: Hasil Capaian Program/Kegiatan sampai Triwulan I Tahun berjalan berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025;
- Bab III: Perbandingan Program/Kegiatan sebelum dan setelah Perubahan Tahun 2025;
- Bab IV: Penutup

BAB II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

II. 1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2025 terdiri dari 10 Program, 17 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 17.131.263.000,- dan setelah perubahan anggaran belanja bertambah menjadi sebesar Rp. 17.410.977.000,- Dengan Anggaran tersebut diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%.. Pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terdiri :
 - 1). Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%.
 - b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%.
 - c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%.
 - d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%
 - e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%

- f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 0%
- g) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- h) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- i) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- j) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- k) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- l) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target 100% yang terealisasi 0%
- m) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- n) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
- o) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dengan kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan target 100% yang terealisasi 0%

- p) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
 - q) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
 - r) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan target 22% yang terealisasi 4%
- 2). Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:
Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.
- 3). Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.
- 4). Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
- a) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatanannya.
 - b) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
 - c) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
 - d) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.
- 5). Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD
Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu :
- a). Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b) Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

- c) Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 6). Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:
 - a). Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
 - b). Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
 - c). Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
 - d). Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan
Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = (9/4*100)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat Daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00

2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	4	4	2,00	0,50	6,00	50,00
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1	1	1,00	1,00	2,00	66,67
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	2	2	2,00	1,00	4,00	66,67
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	1	1	1,00	1,00	2,00	66,67
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	2	2	2,00	1,00	4,00	66,67
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	4	4	2,00	0,50	6,00	50,00

2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	560	560	25,00	0,04	585,00	1.392,86
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	1	1	0,00	0,00	1,00	33,33
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12	12	25,00	2,08	37,00	61,67
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan pelayanan administrasi umum (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	185	4	65	0,00	0,00	4,00	2,16
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540	180	180	20,00	0,11	200,00	37,04

2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	2	23	0,00	0,00	2,00	6,67
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480	414	160	15,00	0,09	429,00	89,38
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	19,00	1,58	31,00	86,11
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	13,00	1,08	25,00	69,44
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	calupan ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	1	1	8,00	8,00	9,00	300,00

2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	231	18	55	10,00	0,18	28,00	12,12
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240	2	35	0,00	0,00	2,00	0,83
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	1	0,00	0,00	1,00	33,33
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	cakupan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanan RPPLH (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	6	1	0,00	0,00	0,00	1,00	16,67
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan KLHS (%)	100	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00

2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	3	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	2	2	0,00	0,00	2,00	33,33
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3	1	2	0,00	0,00	1,00	33,33
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00

2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	33	11	11	0,00	0,00	11,00	33,33
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	46	11	17	0,00	0,00	11,00	23,91
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%)	30	30	30	0,00	0,00	30,00	100,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase kawasan perkotaan (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	141	47	47	25,00	0,53	72,00	51,06
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	persentase jumlah usaha milik izin penyimpanan sementara limbah B3 (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00

2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	17	5	5	0,00	0,00	5,00	29,41
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Limbah B3 dalam satu Daerah (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	16	5	5	0,00	0,00	5,00	31,25

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	100	95	100	0,00	0,00	95,00	95,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan (%)	100	85	100	0,00	0,00	85,00	85,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	37	7	12	0,00	0,00	7,00	18,92
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	106	35	35	0,00	0,00	35,00	33,02

2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	cakupan pengakuan keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3	5	1	0,00	0,00	5,00	166,67
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00

2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15	5	5	0,00	0,00	5,00	33,33
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)	100	95	100	0,00	0,00	95,00	95,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	cakupan penanganan aduan (%)	100	95	100	0,00	0,00	95,00	95,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	40	8	10	0,00	0,00	8,00	20,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota (%)	82	76	78	4,00	0,05	80,00	97,56

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	24	20	22	4,00	0,18	24,00	100,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3	3	5	0,00	0,00	3,00	100,00
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	69	22	22	13,00	0,59	35,00	50,72
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	30	9	9	16,00	1,78	25,00	83,33

II. 2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

- a. Meningkatnya volume sampah
Kenaikan jumlah sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri, menjadi masalah utama karena melebihi daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- b. Kurangnya fasilitas pengolahan sampah
Keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, seperti tempat pembuangan akhir, bank sampah, dan fasilitas daur ulang, memperparah masalah penanganan sampah.
- c. Dampak negatif pembuangan sampah ilegal
Praktik pembuangan sampah ilegal, baik di lahan kosong maupun saluran air, menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha
Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya menjaga lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perizinan lingkungan usaha.
- e. Belum adanya regulasi yang jelas
Tidak adanya naskah akademik dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Sidrap menjadi kendala dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha yang berkelanjutan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil revidan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Renja Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan lapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebanyak 10 (Sepuluh) program, 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Subkegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 17.410.977.000,- sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - 2) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
1. Penyimpanan sementara Limbah B3

- 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- VII. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
- VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- X. Program Pengelolaan Persampahan
 1. Pengelolaan Sampah
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SEBELUM PERUBAHAN				SEBELUM PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	6.557.977.860,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	6.557.261.673	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	31.361.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	28.842.400	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	4	11.977.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	4	9.581.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	1.527.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	1.280.100	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	2	1.794.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	3.422.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	1.711.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	1.369.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	2	3.231.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	4.293.800	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	4	11.121.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	4	8.896.500	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.927.473.860,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.924.238.773	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	560	3.907.113.860,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	560	3.907.113.773	Aparatur dan Masyarakat

2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1	7.630.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	6.543.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	20	12.730.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	20	10.582.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan pelayanan administrasi umum (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	153.529.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	78.503.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	65	3.500.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	65	3.500.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	180	150.029.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	180	75.003.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	1.788.514.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	1.862.864.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	2	1.788.514.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	23	1.862.864.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	448.590.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	429.303.500	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	160	5.010.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	160	5.010.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	74.040.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	12	65.340.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	369.540.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	12	358.953.500	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	calupan ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	208.510.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	233.510.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	1	42.494.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	42.494.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	55	133.966.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	55	133.966.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	35	17.050.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	35	17.050.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1	15.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	40.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	300.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	300.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	cakupan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	0,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	0	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kab. Sidenreng Rappang	0	0,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan KLHS (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	300.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	300.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Sidenreng Rappang	2	300.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	300.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	53.807.500,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	11.94	43.786.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	41.567.500,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	36.442.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Sidenreng Rappang	2	26.567.500,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	23.089.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Sidenreng Rappang	2	15.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	2	13.353.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	12.240.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	7.344.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Sidenreng Rappang	11	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	11	3.876.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab. Sidenreng Rappang	17	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	17	3.468.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	30,00	2.072.362.400,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	30,00	2.151.257.027	Aparatur dan Masyarakat
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase kawasan perkotaan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	2.072.362.400,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	100	2.151.257.027	Aparatur dan Masyarakat
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	47	2.072.362.400,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	47	2.151.257.027	Aparatur dan Masyarakat
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	18.190.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	11.441.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	persentase jumlah usaha milik izin penyimpanan sementara limbah B3 (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	5.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.439.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Sidenreng Rappang	5	5.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	4	3.439.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Limbah B3 dalam satu Daerah (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	13.190.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	8.002.000	Aparatur dan Masyarakat
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Sidenreng Rappang	5	13.190.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	4	8.002.000	Aparatur dan Masyarakat

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	24.720.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	16.053.000	ASN Lingkup DLH
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	24.720.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	16.053.000	ASN Lingkup DLH
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Sidenreng Rappang	12	10.000.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	7	6.980.000	ASN Lingkup DLH

2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Sidenreng Rappang	35	14.720.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	25	9.073.000	ASN Lingkup DLH
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	3.927.000	ASN Lingkup DLH
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	cakupan pengakuan keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	3.927.000	ASN Lingkup DLH

2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Sidenreng Rappang	5	6.120.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	1	3.927.000	ASN Lingkup DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	37.745.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	26.056.000	ASN Lingkup DLH
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	37.745.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	26.056.000	ASN Lingkup DLH
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Sidenreng Rappang	5	37.745.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	5	26.056.000	ASN Lingkup DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	8.205.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100,00	5.289.000	ASN Lingkup DLH

2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	cakupan penanganan aduan (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	8.205.000,00	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	100	5.289.000	ASN Lingkup DLH
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Sidenreng Rappang	10	8205000	ASN Lingkup DLH	Kab. Sidenreng Rappang	7	5.289.000	ASN Lingkup DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota (%)	Kab. Sidenreng Rappang	47.67	8.052.135.240,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	77.90	8.295.906.300	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	Kab. Sidenreng Rappang	100	8.052.135.240,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	100	8.295.906.300	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Sidenreng Rappang	5	1.770.559.440,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	5	1.865.313.000	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Kab. Sidenreng Rappang	4	375.000.000,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	4	375.000.000	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang

2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kab. Sidenreng Rappang	22,000	4.094.116.800,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	22,000	4.393.707.400	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Sidenreng Rappang	9000,000	1.812.459.000,00	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	9,000	1.661.885.900	Masyarakat Kab. Sidenreng Rappang

BAB IV.

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan
2. Kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat
3. Tingkat kualitas udara menunjukkan penurunan, dan perlu diperhatikan lebih baik
4. Kemajuan transportasi dan industri yang tidak diringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif yang besar
5. Tingkat pencemaran air pada berbagai air baik air permukaan maupun air tanah juga menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan, yang dapat mengancam pemenuhan kebutuhan air bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat
6. Sungai-sungai kehilangan fungsi ekologisnya karena tercemar limbah industri dan rumah tangga
7. Kondisi tanah yang semakin tercemar oleh bahan kimia yang berasal dari sampah padat dan pupuk kimia
8. Hilangnya berbagai spesies keanekaragaman hayati juga menjadi salah satu cerminan degradasi daya dukung lingkungan
9. Muncula berbagai penyakit endemik di masyarakat
10. Makin tingginya pemakaian bahan bakar fosil menyebabkan meningkatnya emisi gas-gas pencemar

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk pencapaian visi dan misi tersebut di atas sangat ditentukan oleh faktor keberhasilan sebagai berikut :

1. Kerjasama yang baik oleh sumber daya manusia, lingkungan, baik petugas pelayanan publik, masyarakat dan pelaku usaha
2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, terutama di tingkat lapangan
3. Kesiapan tenaga teknis di bidang lingkungan hidup untuk menangkai dampak kerusakan lingkungan hidup
4. Tersedianya sarana pendukung dan alat-alat kantor yang memadai

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 merupakan acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan :

1. Seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengimplementasikan Renja ini dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Keberhasilan sektor lingkungan hidup harus didukung oleh sektor-sektor lain yang terkait dan didukung oleh pendanaan yang memadai.
3. Rencana kerja ini merupakan langkah awal dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Perlu didasari bahwa keberhasilan di bidang lingkungan hidup tergantung dari partisipasi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam implementasi renja ini diharapkan partisipasi yang lebih aktif dan luas dari seluruh masyarakat.
5. Setiap kegiatan yang dilaksanakan difokuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam OPD, sebagai sasaran program pada akhir tahun perlu dilakukan evaluasi dan analisis tentang apa yang telah dicapai maupun yang belum tercapai sebagai bahan untuk menyusun program berikutnya.

Pangkajene Sidenreng,

2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 198106112000031002